

**OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA
(Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu
Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung tengah)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh:

Deny Ayu Fitriana
NPM: 1731040003

Prodi : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA
(Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu
Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung tengah)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh:

Deny Ayu Fitriana
NPM: 1731040003

Prodi : Pemikiran Politik Islam



Pembimbing I
Pembimbing II

:Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
:Abdul Qohar, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK
OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA
(Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu
Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung tengah)

Oleh
DENY AYU FITRIANA

Sejak lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memposisikan desa sebagai ujung tombak dari sebuah pembangunan nasional. Dengan adanya undang-undang desa dapat memberikan kejelasan posisi dan juga kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangga desanya. Regulasi tersebut sekaligus mengatur kebijakan pemerintah tentang pemberian dana desa yang memungkinkan untuk digunakan pembangunan potensi yang dimiliki. Selain itu kebijakan tentang desa memberikan desa sumber dana dan juga kewenangan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya penggunaan dana desa yang di realisasikan pada desa hanyalah sebatas untuk pembangunan secara fisik, hal ini menyebabkan suatu pembangunan menjadi kurang optimal. Pencapaian suatu tujuan dalam pemerintahan akan di katakan sesuai apabila sudah mencapai batas optimal. Serta dengan mengikutsertakan masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan spirit undang undang desa, namun optimalisasi yang di lakukan aparatur Desa Mujirahayu dalam mengelola dana desa terhadap pengembangan peternak hanya sebatas peminjaman modal terhadap kelompok yang berpotensi dalam membangun perekonomian masyarakatnya dalam hal ini masyarakat hanya diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan saja. Penelitian ini berusaha menjawab apakah kebijakan yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dana desa sudah optimal, dan bagaimana dampak kebijakan aparatur desa terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, serta teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori George R. Terry dengan 4 indikator yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan) yang membantu peneliti menjelaskan variabel yang akan di teliti. Hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi aparatur desa dalam mengelola dana desa terhadap pengembangan peternak Desa Mujirahayu dengan melalui pinjaman modal yang bersumber dari Dana Desa dengan jangka 6 bulan pengembalian yang nantinya di peruntukan untuk pembangunan secara fisik di Desa Mujirahayu bisa dikatakan optimal dalam pengarus utamaan tujuan awal di turunkannya dana desa untuk suatu pembangunan desa, baik pembangunan secara ekonomi, politik, maupun fisik. Kebijakan yang dilakukan aparatur desa terhadap pembangunan ekonomi menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa sebagai pemimpin desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang menghantarkan kesejahteraan serta mengajarkan pentingnya peran kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan dalam waktu yang bersamaan tanpa harus ada kecemburuan sosial dari berbagai elemen masyarakat. Kebijakan yang dilakukan aparatur desa dalam mengelelola dana desa bisa di katakana optimal, hal ini di buktikan dengan adanya keterkaitan dampak dari kebijakan aparatur desa yang di rasakan oleh seluruh masyarakat desa mujirahayu.

PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Ayu Fitriana
NPM : 1731040003
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Aparatur Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmattullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021
Peneliiti



Deny Ayu Fitriana
1731040003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)780887

PERSETUJUAN

**Judul : OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM
MENGELOLA DANA DESA (Studi Terhadap
Pengembangan Peternakan Desa Mujirahayu
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah)**

Nama : Deny Ayu Fitriana

NPM : 1731040003

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Ali Abdol Wakhid, M.Si

NIP.197503172003121003

Pembimbing II

Abdul Qohar, M.Si

NIP.197103122005011005

Mengetahui

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP. 197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Terhadap Pengembangan Peternakan Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)** Disusun oleh: **Deny Ayu Fitriana NPM: 1731040003**, Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 08 November 2021, Pukul 14.00-16.00 WIB**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Agung M. Iqbal, M.Ag

Sekretaris

Eska Prawisudawati Ulpa, S.Psi M.Si

Pembahas Utama

Drs. Agustsmasyah, M.I.P

Pembahas Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembahas Pendamping II : Abdul Qohar, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 996003131989031004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa Ayat 58)

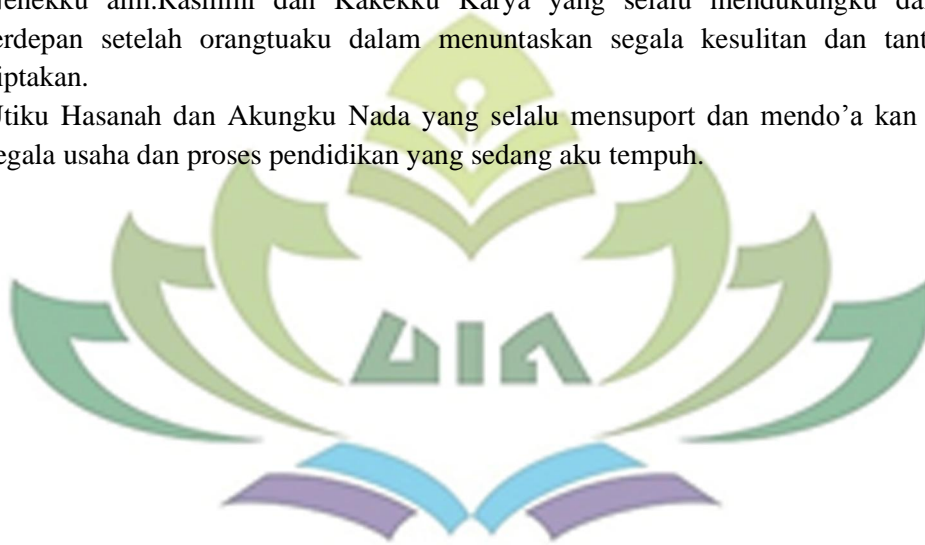


PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahilalamin* dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT, Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam meraih cita-citaku.

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ibundaku Rustiyana dan Ayah ku Wahyudin terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal'amin*.
2. Adikku tersayang Andi wahyu H. yang selalu mendoakan dan selalu mendukungku untuk segera menyelesaikan studiku.
3. Nenekku alm.Rasmini dan Kakekku Karya yang selalu mendukungku dan menjadi garda terdepan setelah orangtuaku dalam menuntaskan segala kesulitan dan tantangan yang aku ciptakan.
4. Utiku Hasanah dan Akungku Nada yang selalu mensuport dan mendo'a kan atas kelancaran segala usaha dan proses pendidikan yang sedang aku tempuh.



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Deny Ayu Fitriana merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Wahyudin dan Ibu Rustyana. Lahir di Penantian, pada tanggal 13 Desember 1999.

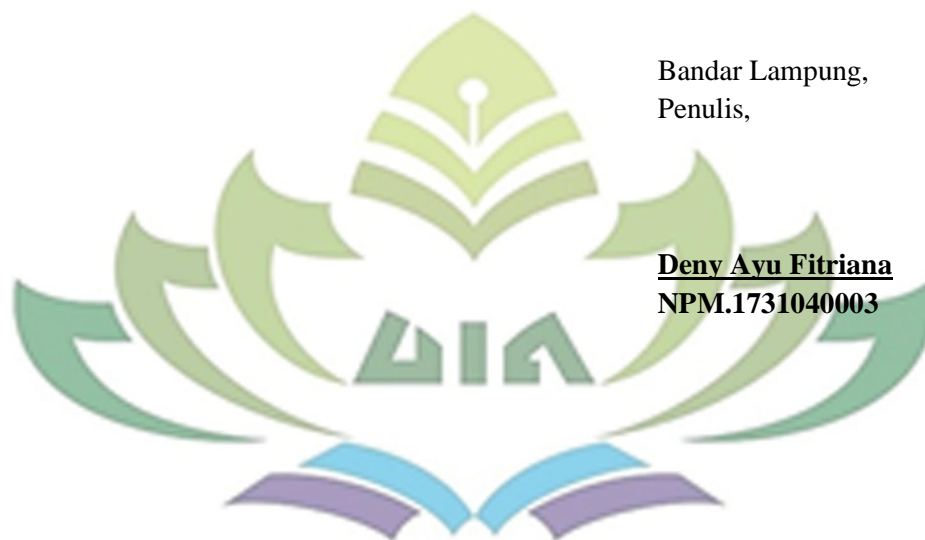
Pendidikan yang penulis tempuh di mulai pada tahun 2005 penulis menyelesaikan pendidikan Raudhatul Athfal Bustanus Sibyan di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Dilanjutkan pada tahun 2006 penulis mengenyam pendidikan dasar di SD 03 Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikannya di Madrahas Tsanawiyah Al-hikamussalafiyah di Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah atas di SMA Manba'ul Ulum Gayau sakti Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. lalu lulus pada tahun 2017.

Puji syukur Alhamdulillah penulis melanjutkan kembali mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 tercatat sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam dan diselesaikan pada tahun 2021.

Bandar Lampung,
Penulis,

Agustus 2021

Deny Ayu Fitriana
NPM.1731040003



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita. Sholawat teriring salam senantiasa selalu tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahannya serta rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlunya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Mohammad. Mukri, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak **Drs. Agustamsyah, M.I.P**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku kuliah.
5. Bapak **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** dan Bapak **Abd Qohar, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis terkhususnya di jurusan Pemikiran Politik Islam.
7. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.
8. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.
9. Bapak **Eko Budi Aris Susanto**, selaku sekretaris Kampung Mujirahayu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian Kampung Mujirahayu.
10. Bapak **Subandi**, selaku Kepala Kampung Mujirahayu yang turut menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
11. Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2017 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
12. Sahabatku tercinta Nurul Aini S,pd.i selaku penasehat religius dan Maya Indriani S.pd selaku penasehat secara biologisku.
13. Someone for something yang selalu menemani dan meridhio setiap proses dan langkahku Bagus Prasetyo.
14. Saudara besarku yang selalu jadi tujuan ku saat aku merasa gunda dan gelisah Nurkholifah M.Pd dan Meli apriani S.E yang setia merawat dan menyayangi ku seperti malika.
15. Sahabatku Netizen Ajeng Gayatri, Jenita Permatasari, Irma Deviana, Rachma Octariani, Siti Nur azizah, Yuliana, Eva Rosalia dan Sinta Afrika yang selalu menjadi support system saat gabut melanda sanubariku.
16. Sahabat karibku selalu membantu dalam penyelesaian skripsiku Iman Suryaman S.H.
17. Kader kader HMI yang telah memberikan banyak pelajaran dan kesadran akan hausnya keilmuan yang perlu kita tuntaskan.
18. Keluarga besar ku yang tidak pernah lelah dan letih mensupport dan memotivasi di setiap tindakan yang aku putuskan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penulis,

Deny Ayu Fitriana
NPM.1731040003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	2
SURAT PERNYATAAN	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
PENGESAHAN.....	5
MOTTO	6
PERSEMBAHAN.....	7
RIWAYAT HIDUP	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR LAMPIRAN	13
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	14
J. Kerangka Teoritik	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Optimalisasi Aparatur Desa	17
1. Pengertian Optimalisasi	17
2. Indikator Optimalisasi	21
B. Pengelolaan Dana Desa.....	23
1. Pengertian Pengelolaan.....	23
2. Indikator Pengelolaan	26
3. Asas-Asas Pengelolaan.....	29
C. Mentalitas pembangunan	31
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Mujirahayu	34
B. Profil Kampung Mujirahayu	35
C. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Mujirahayu.....	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	40
3. Tingkat Pendidikan	40
4. Mata Pencarian.....	40
5. Pola Penggunaan Tanah	41
6. Pemilikan Ternak Dan Kelompok Ternak.....	41
7. Sarana dan Prasarana Kampung.....	42
D. Keadaan Sosial Desa Mujirahayu.....	42
1. Sumber Daya Manusia.....	42
2. Pendidikan	42
3. Kehidupan Beragama	42
4. Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	42
5. Kondisi Ekonomi.....	43
E. Kondisi Pelayanan Aparatur Desa Mujirahayu	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya aparaturnya dalam mengelola dana desa terhadap pengembangan peternak sapi desa mujirahayu	44
1. Perencanaan dana desa	44
2. Pengorganisasian dana desa.....	50
3. Pelaksanaan dalam mengelola dana desa.....	54
4. Pengawasan pengelolaan keuangan desa	57
B. Dampak ekonomi masyarakat peternak sapi terhadap optimalisasi aparaturnya desa dalam mengelola dana desa.....	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	76
----------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Tabel Informan	11
1.2 Tabel Kerangka Teoritik	15
3.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
3.2 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama	40
3.3 Data Kelompok Pendidik Menurut Usia	40
3.4 Data Kelompok Tenaga Kerja Berdasarkan Umur.....	41
3.5 Data Lulusan Pendidikan Umum	41
3.6 Data Lulusan Pendidikan Khusus	41
3.7 Data Penduduk Menurut Mata Pencarian Karyawan.....	42
3.8 Data Nama Nama Kepala Kampung Yang Pernah Menjabat Sampai Saat Ini	42
3.9 Struktur perangkat Desa Mujirahayu Tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah	43
3.10 Jumlah Penduduk.....	44
3.11 jumlah Tingkat Pendidikan.....	44
3.12 Mata pencarian.....	44
3.13 Kepemilikan ternak.....	45
3.14 Kelompok ternak	45
3.15 Prasarana kampung.....	46
4.1 Sarana Dan Prasarana Yang Di Bangun DD 2020	64



DAFTAR GAMBAR

5.1 Wawancara Dengan Bapak Eko Syarifudin Selaku Kaur Keuangan	92
5.2 Wawancara Dengan Bapak Eko Budi A.S Selaku Skretaris	92
5.3 Wawancara Dengan Bapak Andiansyah Selaku Kaur Umum dan Perencanaan	93
5.4 Wawancara Dengan Bapak Subandi Selaku Kepala	93
5.5 Wawancara Dengan Bapak Juli Rudiyanto Kepala Seksi Kesejahteraan	94
5.6 Wawancara Dengan Bapak karjono Ketua Kelompok Ternak.....	94
5.7 Wawancara Dengan Bapak Sukamto Sekretaris Kelompok Ternak	95
5.8 Wawancara Dengan Bapak Cecep Anggota Kelompok Ternak.....	95
5.9 Wawancara Dengan Bapak Toni Anwar Anggota Kelompok Ternak	96
5.10 Wawancara Dengan Bapak Susanto Anggota Kelompok Ternak.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Permohonan Riserch	97
2. Lampiran Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	98
3. Lampiran Surat Balasan Penelitian Kelurahan.....	99
4. Lampiran Surat Persetujuan Pembimbing.....	100
5. Lampiran Surat Konsultasi Bimbingan.....	101
6. Pedoman Wawancara	102
7. Hasil Wawancara.....	103
8. Hasil Turnitine.....	104



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Agar lebih mudah mengetahui makna yang terkandung didalam skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul diatas, perlu kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu maksud dan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalm skripsi ini adalah **“OPTIMALISASI APARATUR DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”**

Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas, secara terperinci untuk memahami makna judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang berkembang dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang di kehendaki penulis berikut ini dapat di jelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

Jadi optimalisasi aparatur Desa dalam hal penelitian ini tentu yang di maksud adalah suatu upaya aparatur desa sebagai pemegang peran penting dalam memegang kebijakan di suatu wilayah yang berupaya mengoptimalkan pengelolaan dan pembangunan desa yang telah menjadi tujuan dan harapan bagi setiap masyarakat, terutama dalam lingkup pemerintahan di desa.

Mengelola Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengelola adalah mengendalikan. Arti lainnya dari mengelola adalah menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya).² Sedangkan menurut handyaningrat, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan, pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna-pengguna sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.³

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Mengelola dana Desa merupakan upaya aparatur desa sebagai pemeran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang berwewenang dalam mengendalikan fasilitas yang di berikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dengan berupa dana desa yang di berikan untuk pembangunan di sebuah desa melalui pemanfaatan dana yang bersumber dari dana desa yang dimana dana tersebut di peroleh dari hasil anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk pembiayaan yang berhubungan dan menyangkut kemaslahatan masyarakat setempat.

¹ dkk Revaldo W.sindakh, ‘Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendaptan Asli Daerah Kota Bitung’, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 No.2337–5736 (2019), 2.

² id Lektur, ‘4 Arti Kata Mengelola Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’ <<https://lektur.id/arti-mengelola/>> [accessed 5 February 2021], 8.

³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Sosial Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: HajiMasagung, 1997). 27.

⁴ Ratna ekasari, ‘Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi’, EA Publishing, 2020, 1.

Dari penjelasan judul di atas penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah aparat desa sudah optimal dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa yang di gambarkan melalui kebijakan aparat desa yang memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kemajuan untuk masyarakatnya dalam ruang lingkup kemajuan sebuah desa yang di tinjau dari aspek pengembangan peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Percepatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah bergulir di daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang diharapkan oleh daerah. Otonomi daerah ini merupakan fenomena politisi yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaan) dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional (sijori), perubahan pola atau system informasi global.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/ masyarakat.⁵

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan rasional tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dilihat dari aspirasi kewenangan pengurusan keuangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah serta proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembayarannya pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁶

Dalam pelaksanaan pembangunan di era pasca reformasi ini, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi serta produktifitas Aparaturnya sebagaimana diamanatkannya oleh garis besar program pembangunan Nasional. Bahwa dalam sistem pemerintahan kita menganut azaz-azaz desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind*, sehingga peran pemerintah sebagai instrument penyelenggaraan bernegara dalam menjalankan fungsi alokasi, regulasi, dan stabilisasi sumber daya nasional dapat terlaksana samapai ke tingkat pemerintahan yang terendah.⁷

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir dalam proses demokrasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi topik strategis dalam perbincangan pemerintahan sekarang ini. Tak sedikit yang mengharapkan hal tersebut dapat mendorong tercapainya pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang cepat, tepat dan merata.

Otonomi daerah bukan merupakan tujuan akhir dalam reformasi total, namun sebagai sarana pencapaian tujuan utama. Tujuan utamanya adalah sebagai mana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

⁵ Widjaja, *OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011). 6-7.

⁶ Ibid. hal.222-223

⁷ Abdul Qohar, 'Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern', *Jurnal TAPIS Vol.8*, 2012. 140.

sosial.⁸ Dapat dipahami dari tujuan tersebut bahwa Indonesia menganut asas kesejahteraan yang menempatkan perlindungan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utamanya.

Pada dasarnya desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pada daerah administratif untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Penyerahan wewenang ini mempunyai tujuan memberdayakan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa terpengaruh oleh campur tangan pemerintah pusat, tetapi masih berada dalam satu negara kesatuan. Secara ekonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.⁹

Setelah bergulir selama hampir dua dekade pelaksanaan otonomi daerah semakin berkembang. Pemerintah pusat senantiasa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat desentralisasi, ditandai dengan peningkatan besarnya alokasi dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahunnya. Bahkan pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk Desa melalui skema Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program Dana Desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan kebutuhan Desanya.

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari kancah pemerintahan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pada pemerintahan kabinet kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh desa di Indonesia diperkirakan akan menerima kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1 Milyar Rupiah lebih untuk setiap desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak, kewenangan serta kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas kegiatan yang telah dilakukan.¹⁰

Program dana Desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan kebutuhan Desanya. Berbagai dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk percepatan pembangunan daerah sebagai awal pembangunan nasional. Namun sampai saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, minimnya pendidikan dan ketimpangan yang menunjukkan hasil pembangunan relatif belum maksimal.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan lokal bersekala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pengembangan seni budaya lokal: pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat: fasilitas kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, petempunan, masyarakat adat dan difabel dan lain-lain.¹¹

⁸ universitas Gajah Mada, 'Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945', *Universitas Gajah Mada*, 1945. 1.

⁹ Antono Herry P.A, 'Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V, 739.

¹⁰ Astri Juainita Makalang dkk, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Manado', 2015.

¹¹ Mochammad Zaini Mustakim, *KEPEMIMPINAN DESA, Kementriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia* (Indonesia, 2015). 14.

Pembangunan nasional yang bersifat multidimensi dalam pengelolaannya melibatkan segenap Aparatur Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah bahkan sampai di tingkat terendah yaitu Desa. Sehingga di butuhnya komponen atau aparatur yang dimaksud hendaknya memiliki kemampuan dan ketrampilan yang optimal untuk menunjang dalam pelaksanaan tugasnya secara maksimal.

Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor Desa, administrasi, pembinaan Aparatur Desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Desa. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala desa, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.¹²

Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Persoalan dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaranya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.¹³

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa yang disebut dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rumusan pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi pemerintah desa adalah kepala desa di bantu perangkat desa atau sering di sebut aparatur desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁴

Perangkat desa dan kepala desa merupakan basis pelayanan masyarakat di komplek suatu desa. Tinggi rendahnya suatu kualitas pengelolaan dana desa yang di berikan oleh pemerintah kepada aparatur desa dapat di nilai bukan hanya sekedar besarnya nominal yang di kucurkan pada pembangunan desa dan masyarakat melainkan tata pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa apakah sudah sesuai dengan pokok dan fungsi yang sesuai pada peraturan Undang-Undang desa yang di tuangkannya melalui bentuk gagasan gagasan ide yang di sumbangsihkan aparatur desa untuk masyarakatnya melalui pemanfaatan dana desa dalam mewujudkan suatu pembangunan desa bersekala panjang.

Aparatur desa adalah ujung tombak implementasi UU Desa. Untuk keberhasilan implementasi, perangkat desa adalah actor penting di dalamnya. Kepala desa diharapkan menjadi contoh yang baik bagi perangkat dibawahnya. Untuk melaksanakan UU Desa perlu adanya keteladanan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Apabila kepala desa memiliki keyakinan antara potensi pengembangan desanya, seperti melalui pembentukan BUM Desa, maka ia akan mampu memotivasi bawahannya. Pengetahuan SDM aparat desa dalam memahami potensi-potensi pengembangan kekayaan desa antara lain BUM Desa, akan membantu mereka dalam memberikan ketauladanan

¹² Trisusanti Lamangida, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyouto', *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6, (2017), 69.

¹³ Ali Abdul Wakhid, 'Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia', *Jurnal TAPIS*, 01 (2017), 56.

¹⁴ Anggraeni rahmasari, nakok aruan, slamet hari susanto, "prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019" *PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI* (badan peneliti dan pengembangan provinsi jawa timur, 2019). 270.

peran dan tanggung jawabnya dalam pemberdayaan atau memperkuat peran serta masyarakat untuk aktif sebagai pelaku pembangunan desa.¹⁵

Tugas utama aparaturnya adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jelas digariskan dalam UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparaturnya terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian suatu tujuan dalam pemerintahan akan di katakana sesuai apabila sudah mencapai batas optimal, dalam hal ini optimalisasi yang dilakukan aparaturnya desa dalam mengelola dana desa study terhadap pengembangan peternak sapi merupakan upaya pemerintah dalam mengamati lingkungan dan sumberdaya yang tersedia untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut untuk suatu tercapainya pembangunan nasional berskala kecil yaitu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya. Desa Mujirahayu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah yang dimana sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani dan peternak selebihnya hanyalah seorang buruh. Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan di Desa Mujirahayu yang notabennya jauh dari perkotaan mengalami keterbatasan sumberdaya manusia menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Mujirahayu mengalami tingkat kemiskinan yang cukup banyak.

Pentingnya menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pemerintahan desa. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia memaksa sebagian besar masyarakat desa mujirahayu memilih investasi dalam bentuk ternak hewan baik mulai dari, sapi dan kerbau, namun diantara beberapa hewan tersebut yang banyak dipilih untuk di investasikan masyarakat adalah sapi. Hal ini selaras dengan salah satu kelompok yang sadar akan minimnya taraf perekonomian masyarakat desa namun memiliki bekal sumberdaya manusia yang cukup sehingga dengan modal kemampuan beberapa masyarakat yang terbentuk menjadi kelompok masyarakat tersebut yang berinisiatif untuk membuat wadah pengembangan bibit sapi yang unggul.

Dalam menyikapi hal ini aparaturnya berupaya memberikan dukungan dan bantuan melalui pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan dasar Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang di antaranya terdapat point Nomor 7 “Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/ atau daerah kabupaten/ kota.”¹⁶

upaya aparaturnya desa yang dilakukan dalam pengoptimalan penggunaan dana desa yakni dengan membangun kerjasama antara masyarakat sekitar dengan masyarakat kelompok pengembangan peternak sapi. Upaya ini dilakukan aparaturnya desa untuk melancarkan niatnya dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dengan menjadikannya masyarakat sebagai pemasok bibit sapi kelompok ternak dengan aliansi untuk meminimalisir kurangnya pasokan bibit sapi yang pasti dimana nantinya di kelola dan diperbaiki kembali dalam kelompok tersebut. Hal ini diperuntukan sebagai pencapaian taraf perekonomian yang saling menguntungkan antara para peternak non keolompok dengan masyarakat kelompok. upaya ini dilakukan aparaturnya desa sebagai gambaran sikap tanggung jawab pemerintah desa dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya yang berpotensi. Sebab kemajuan desa akan terukur berdasarkan meningkatnya taraf perekonomian masyarakatnya.

¹⁵ Ucu martanto Bintoro Wardiyanto, Siti aminah, *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa* (surabaya: Airlangga University Press, 2016). 172.

¹⁶ erwin setyadi Bawono, Icuk Ranga, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, ed. by junaidi (Jakarta: PT. Grasindo, 2019). 86-87.

Semenjak di Undangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa tanggung jawab masyarakat dapat di jalankan oleh aparatur Desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintah.

Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan terendah menjadi salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun yaitu peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penggunaan dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan kondisi sementara yang terjadi di desa mujirahayu dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan seorang peternak pembibitan sapi. melalui beberapa inisiatif para peternak sapi penghasil bibit sapi unggulan yang di kelola oleh beberapa orang dalam satu kelompok yang terdiri dari ketua kelompok, sekretaris kelompok dan anggota kelompok. Dimana kelompok tersebut sengaja di bentuk sebagai wadah masyarakat untuk saling berbagi dan bertukar ilmu yang dimiliki setiap individu masing masing dalam berternak untuk memperoleh bibit sapi yang unggul.seiring berjalannya waktu adanya kelompok peternakan sapi yang semakin hari mengalami peningkatan minat konsumen dari berbagai daerah menyita perhatian aparatur desa untuk mendukung perkembangan masyarakatnya dengan aliansi adanya sumberdaya manusia yang memadai untuk dikembangkan dan diperhatikan dengan melalui upaya pemerintah desa memberikan pinjaman modal terhadap kelompok peternak sapi maju mandiri. Untuk selanjutnya di gunakan untuk memperbesar pemasaran tingkat desa namun yang terjadi peran aparatur desa hanya sekedar menjadi pemodal secara financial yang bersumber dari dana desa.

Sedangkan sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Undang-Undang desa juga memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 permendes Nomor 22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.¹⁷

Tetapi yang terjadi pada lapangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 yang di laksanakan oleh aparatur desa dalam mengembangkan peternakan sapi masyarakat hanya diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan turunnya dana desa. Perencanaan untuk mengembangkan kelompok peternak di lakukan melalui pengajuan proposal pinjaman dana desa sebagai modal untuk mengembangkan kelompok peternak yang kemudian di realisasikannya bantuan pinjaman dana desa untuk kelompok peternak. Pelaksanaan turunnya bantuan pinjaman modal yang dilakukan seakan hanya sebagai penggugur kewajiban terhadap penggunaan dana desa. tanpa ada pengorganisasian dan pengawasan dalam pengelolaan dana yang di kembalikan untuk pembangunan potensi desa lebih lanjut.

Menurut observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai salah satu ketua kelompok ternak maju mandiri yaitu bapak karjono sebagai masyarakat sekaligus ketua kelompok peternak mengungkapkan mengenai kebijakan yang di berikan oleh Aparatur Desa Mujirahayu dalam upaya mendukung usaha kelompok masyarakat, aparatur desa sebagai pelaksanaan pemerintah desa dalam mengelola dan pengalokasian dana desa yang memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas pinjaman modal yang di berikan oleh pemerintah desa terhadap kelompok peternak sapi

¹⁷ Bawono, Icut Ranga. Hal.86

maju mandiri Desa mujirahyu sebagai upaya pengembangan potensi desa penghasil bibit sapi unggul.¹⁸

Namun banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat mengisyaratkan pada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, selain itu juga di perlukannya kesiapan sumber daya aparatur pemerintahan desa. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah desa diperlukan untuk mengembangkan kompetensi yang menyangkut sikap, ketrampilan, serta keahlian dalam menghadapi tantangan setiap perkembangan dari pemerintah dan sosial masyarakat itu sendiri.

Konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut akan terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik, meskipun dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Hal tersebut sangat penting sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, sumber daya yang memadai dalam bidang pendidikan, kerjasama perangkat desa dan lembaga organisasi desa yang baik, serta partisipasi masyarakat setempat dalam hal pembangunan juga dapat memperlancar tercapainya tujuan desa yang sesungguhnya.

Mengingat pentingnya optimalisasi aparatur desa sebagai faktor penentu dalam sukses atau gagalnya pengembangan potensi desa. Pemerintahan desa seperti halnya pemerintah pusat dan daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan mampu menjawab tuntutan yang makin tinggi dari masyarakat, baik dari kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Menurut pengamatan penulis dari hasil pra survey peran aparatur pemerintah desa berpengaruh besar terhadap pembangunan sebuah desa di setiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana optimalisasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa yang di tuangkan dalam bentuk kebijakan sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan potensi Desa secara efektif dan efisien (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu).

C. Fokus penelitian dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti memfokuskan penelitian pada Optimalisasi Aparatur Desa Dalam Mengelola Dana Desa Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Adapun sub-fokus penelitian yaitu :

1. Upaya aparatur desa dalam pengelola dana desa terhadap pengembangan peternak sapi Desa Mujirahayu.
2. Dampak ekonomi masyarakat terhadap optimalisasi aparatur Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya aparatur dalam mengelola dana desa terhadap pengembangan peternak sapi Desa Mujirahayu?
2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat terhadap optimalisasi aparatur desa dalam mengelola dana desa?

¹⁸ Wawancara dengan karjono, tanggal 13 desember 2020 di Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji upaya aparaturnya dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengkaji dampak upaya optimalisasi aparaturnya desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah ;

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi media untuk memberikan dan menambah wawasan keilmuan dibidang politik, khususnya yang berkaitan dengan konsep pengelolaan Dana Desa.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat membuka cakrawala dalam pengelolaan Dana Desa serta memberikan masukan atau bahan informasi bagi peneliti yang ingin mendalami optimalisasi aparaturnya desa khususnya optimalisasi aparaturnya desa dalam mengelola dana desa serta dapat berguna bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja untuk masyarakat Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilakukan.¹⁹

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan karya ilmiah sebelumnya, meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian baik berbentuk buku, karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang optimalisasi, peneliti mengarah pada optimalisasi aparaturnya desa dalam mengelola dana desa (studi terhadap pengembangan peternak sapi desa mujirahayu kecamatan seputih agung), dan fokus penelitian pada optimalisasi aparaturnya desa dalam mengelola dana desa. Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul **“analisis optimalisasi alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa ranggo kecamatan limun kabupaten sarolangun tahun 2014-2018”**, karya riki rina sari mahasiswi program studi ekonomi syariah universitas islam negri sulthan thaha saifudin jambi 2019. Skripsi ini fokus pada penggambaran pengelolaan ADD dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa ADD di Desa Ranggo digunakan untuk meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur yang pada dasarnya telah dapat dicapai namun belum secara optimal, sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah optimalisasi yang bersumber dari dana desa bukan hanya untuk meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur melainkan pembangunan pada pemberdayaan masyarakatnya melalui pemberdayaan ekonomi.

¹⁹ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paradikma, 2005). 74

2. Skripsi yang berjudul :”**peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam**”, karya M. indra mulyana, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018, skripsi ini fokus pada peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang ada di desa sinar Palembang kecamatan candipuro kabupaten lampung selatan berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dengan dilihatnya dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat, sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah peneliti tidak membahas pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam, dimana peneliti hanya membahas kebijakan aparatur desa dalam mengelola dana desa terhadap pemberdayakan ekonomi masyarakat.
3. Jurnal yang berjudul :”**pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa**”, karya ni putu dessy eka ariyani, Dr. desak nym sri werastuti, I made pradana adiputra, dalam jurnal JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 yang fokus menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kabupaten buleleng, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, sedangkan pada karya ilmiah penelitian yang menjadi pembedanya adalah peneliti tidak membahas tentang efektivitas kinerja pendamping lokal desa yang ada di desa mujirahayu, dimana peneliti hanya terfokus pada optimalisasi aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
4. Jurnal yang berjudul : “**optimalisasi dana desa melalui analisis pembelanjaan di desa pabelan kabupaten semarang**”, karya lutfi ade yulianti, anita wahyu alviani, Muhammad muchlisun, ahmad ulil albab al umar, saiful anwar dalam Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram:Volume 7, Nomor 1, april 2020 yang fokus membahas tentang analisis pertanggungjawaban dana desa di kabupaten semarang, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas dana desa di kabupaten semarang belum berjalan dengan baik. Adanya beberapa masalah dalam pertanggungjawaban dana desa, sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah bukan hanya membahas tentang analisis pertanggungjawaban desa yang menjadi tolak ukur optimalisasi dana desa, tetapi banyak hal yang di analisis dalam mengukur optimalisasi aparatur desa dalam mengelola dana desa.
5. Skripsi yang berjudul “**pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa pantai harapan kecamatan wulandoni kabupaten lembata**”, karya umar saban mahasiswa program studi ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah makasar 2017. Skripsi ini fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa pantai harapan kecamatan wulandoni kabupaten lembata, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa pantai harapan dalam hal

ini pemerintah telah menjalankan perannya, sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah peneliti tidak membahas tentang alokasi dana desa, peneliti hanya terfokus pada pengelolaan dana desa.

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang membahas mengenai Optimalisasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa. Pada skripsi ini peneliti lebih menekankan pada penggambaran optimalisasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa dengan mengkaji tentang upaya aparatur desa yang di taungakan pada pengembangan peternakan sapi di desa Mujirahayu sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui sekala terkecil yaitu dimulai dari terciptanya pembangunan desa, dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya melalui pemberdayaan ekonomi.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Selain itu metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aturan-aturan buku (sistematika dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang berkaitan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekata Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif disebut juga dngan interpretative research, naturalistic reserch, atau phenomenological reaserch. pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitaif juga lebih mementingkan proses dari pada hasil ahir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah uabah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang di temukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada ahirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai “*grounded theory research*”²⁰

2. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹ Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang jelas, utuh dan komprehensif melalui pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan diamati dalam suatu konteks yang dikaji. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkenan atau mencakup dengan

²⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitaif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019). 6-7.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006). 6.

Optimalisasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti, atau sebagai prosedur dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.²² Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Optimalisasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan potensi Desa (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.²³ Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, dengan melakukan pengumpulan data kepada narasumber yang dianggap paham terhadap situasi sosial tersebut. Penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang didasari pada pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan peneliti. Pertimbangan ini maksudnya ialah orang yang dianggap paham tentang hal-hal yang peneliti harapkan, serta anggota sampel dipilih secara khusus.

Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informen dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. informen dalam penelitian ini yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa, dalam hal ini informen penelitian ini yaitu Kepala Desa yaitu Subandi, Sekretaris Desa Eko budiyanto, perangkat desa yang berjumlah 5 orang, anggota kelompok masyarakat pengembangan peternak maju mandiri yang berjumlah 4 orang, dan masyarakat desa mujirahayu yang berjumlah 2 orang. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan untuk kemudian dibahas sesuai masalah yang dikaji oleh peneliti.

Berikut data informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Tempat/ Tanggal wawancara
1	Bapak Subandi	Kepala Desa Mujirahayu	Di kantor balai Desa Mujirahayu, 16 juni 2021

²² Hadari Nawaw, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: gama press, 1987). 63.

²³ M. iqbal hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 81.

2	Bapak Eko Budi A.S	Sekretaris Desa	Di kantor balai Desa Mujirahayu, 16 juni 2021
3	Bapak Eko .S.	Kepala Urusan Keuangan	Di kantor balai Desa Mujirahayu, 16 juni 2021
4	Bapak Andiansyah	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Di kantor balai Desa Mujirahayu, 16 juni 2021
5	Juni Rudyanto	Kepala seksi kesejahteraan	Di kantor balai Desa Mujirahayu, 16 juni 2021
6	Bapak Karjono	Ketua Kelompok ternak	Mujirahayu, 19 juni 2021
7	Bapak Sukamto	Sekretaris Kelompok ternak	Mujirahayu, 20 juni 2021
8	Bapak Cecep	Anggota kelompok ternak	Mujirahayu, 20 juni 2021
9	Bapak Tombol	Anggota kelompok ternak	Mujirahayu, 19 juni 2021
10	Bapak Toni Anwar	Masyarakat	Mujirahayu, 18 juni 2021
11	Bapak Susanto	Masyarakat	Mujirahayu, 18 juni 2021

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Inovasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa. Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Peraturan Terkait, buku tentang akuntabilitas Desa pada tata kelola keuangan Desa dan arsip kegiatan pelaksanaan Dana Desa serta dokumen yang terkait dengan judul penelitian untuk melengkapi data primer.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah serluruh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun yang secara keseluruhan berjumlah 12 orang dan kelompok masyarakat maju mandiri yang berjumlah 20 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁵ Teknik sampling yang di gunakan adalah teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁶ Sedangkan dalam pengambilan sampel digunakan jenis *purposive sampel* yaitu pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang di teliti. Perimbangan tertentu ini maksudnya adalah orang yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (semarang: Walisongo Press, 2009). 117.

²⁵ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 105.

²⁶ Hadi sutrisno, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: YP Fk. Psikologi UGM, 1985). 89.

di anggap tahu tentang hal-hal yang di harapkan oleh peneliti, anggota sampelnya pun dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari ketiga tekniuk tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.²⁷ Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tak berstruktur, wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara, namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.²⁸ Wawancara ini ditunjukan kepada informan dan responden yang terdiri dari stakeholder dan masyarakat kelompok peternak sapi maju mandiri di Desa Mujirahayu yang dipergunakan untuk memperoleh data tentang Inovasi Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan potensi Desa (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang di buat oleh manusia. Dokumentasi yang dimaksud adalah segala suatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas ataupun elektronik.²⁹

Dokumentasi ini dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang di berikan oleh informen yang relevan, yaitu berupa data-data mengenai upaya Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu)

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data sangatlah penting, kegiatan analisis data adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengorganisasikan data karena mengingat bahwa data dalam penelitian kualitatif sangat banyak. Miles dan huberman menggambarkan bahwa analisis data adalah kegiatan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama. Oleh sebab itu, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti.³⁰ Berikut tahap tahap analisis data :

a. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu makaperlu dicatat secara teliti dan rinci seperti telah dikemukakan, semakin lama, peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting, dengan cari dicari tema dan polanya.dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan

²⁷ Muh. Fitrah & Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (CV. Jejak (jejak publisher), 2018). 66.

²⁸ Ibid. hal. 69

²⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi2* (Jakarta: PT.Indeks, 2003). 65.

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1992).

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³¹

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan huberman (1984) menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *“looking at display helps us to understand what is happening and to do something-further analysis or caution on that understanding”*, miles dan huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.³²

c. Conclusion drawing / verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan hoberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi harus disusun dengan sistematika atau format yang lazim digunakan sesuai dengan buku panduan yang sedang berlaku di sebuah perguruan tinggi yang masing-masing, sistematika untuk jenis penelitian kualitatif, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. pada BAB ini merupakan BAB yang sangat penting dan mendasar untuk di jadikan sebagai pedoman untuk arah dari pembahasan yang peneliti sedang teliti.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB ini berisi tentang uraian teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam BAB ini membantu untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian yang dimana teori teori yang di ambil tentunya didasarkan pada literatur primer yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang peneliti teliti.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

BAB ini membahas tentang latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demografi, lingkungan, sebagai gambaran umum objek penelitian yang melatari temuan penelitian. Pada BAB ini lebih

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv, 2017).247.

³² Ibid. hal.249

³³ Ibid. hal. 252

mempertegas dan memperjelas keadaan lingkungan di tengah latar belakang permasalahan yang di jelaskan pada BAB I yang kemudian di pertajam menggunakan landasan teori.

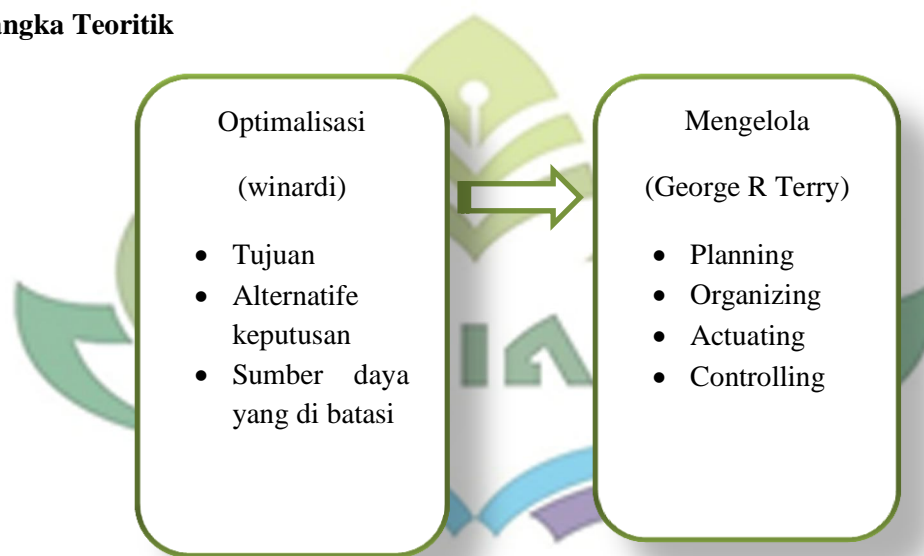
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini membahas tentang hasil penelitian yang di sesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah maupun fokus penelitian yang terdapat pada BAB I yang kemudian mengkaji masalah yang terjadi dilapangan dengan teori yang di gunakan pada BAB II dengan mengamati keadaan lingkungan objek penelitian yang di uraikan pada BAB III sehingga dapat menghasilkan jawaban dan temuan dari permasalahan yang ingin peneliti teliti.

BAB V PENUTUP

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam hal ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang di temukan peneliti yang dinilai ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada BAB-BAB sebelumnya.

J. Kerangka Teoritik



Tabel 1.2
Kerangka Teoritik

Hubungan antara inovasi dan mengelola

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³⁴ Optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau keputusan) untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, sempurna, dan fungsional.

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata *managemen* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti

³⁴ Hotniar Siringoringgo, *Pemograman Linier : Seri Teknik Oprasi* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005). 4.

sama dengan istilah “pengelolaan”, yakni sebagai sesuatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.³⁵

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dalam pengelolaan dana desa dapat menemukan solusi yang terbaik dengan pencapaian yang sesuai harapan. Dalam proses pengelolaan untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana pengelolaan, hal ini merupakan landasan dalam pencapaian maksimal. Sehingga dapat di jelaskan bahwasannya ada hubungan yang saling berkaitan antara variabel optimalisasi dan variabel mengelola.

Jadi variabel dalam penelitian ini yaitu:

Variabel bebas	:Optimalisasi aparatur
Variabel terikat	:Mengelola dana desa



³⁵ Yeni Rachmawati Rita Maryana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Prenada Media, 2013). 16.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi Aparatur Desa

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika di pandang dari sudut usaha. Optimalisasi merupakan suatu usaha memaksimalkan suatu kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.³⁶ Dasar dari makna optimalisasi adalah suatu upaya yang mengupayakan yang terbaik, yang tinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan yang paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sesuatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional atau lebih efektif.³⁷

Optimalisasi adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana dalam upaya optimalisasi aparatur desa dalam mengelola dana desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan citra dan mendukung terlaksananya salah satu pembangunan nasional yang bersekala kecil, yaitu pembangunan desa dengan cara pemanfaatan teknologi informasi yang sangat penting untuk ditingkatkan agar dapat mengembangkan kemampuan masyarakat yang memberikan inovasi baru, sehingga kemampuan dan kreatifitas masyarakat dapat berjalan secara maksimal atas adanya dorongan aparatur desa dalam mendukung dan mendorong potensi masyarakat desa yang maju, sehingga hubungan antara masyarakat dan aparatur desa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebab efesiensi hubungan antara masyarakat dengan aparatur desa akan mampu menunjukan kualitas kepemimpinan kepala desa dalam berperan sebagai kepala biro pemegang kekuasaan di dalam lingkup desa dalam mengupayakan untuk kemajuan suatu desanya. Berdasarkan pemaparan diatas manfaat optimalisasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, untuk mengatasi kendala, memecah masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam proses kinerja aparatur desa untuk mencapai tingkat optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam hal menyusun rencana kerja aparatur desa dalam hal ini menjadi landasan terpenting dalam melakukan kinerja. Optimalisasi proses kinerja aparatur desa merupakan cara untuk memaksimalkan hasil kerja aparatur desa selaku pemegang peran atas desa yang dipegangnya.

Optimalisasi kinerja aparatur desa dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi maka rencana kinerja atau target kerja dapat dicapai dengan tepat dan maksimal sesuai dengan harapan yang di inginkan. Dengan demikian, kesimpulan dari optimalisasi yaitu sebagai upaya/pembangunan, proses, cara, dan perbuatan dalam penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Dalam hal optimalisasi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, baik meliputi kegiatan penataursan pemerintahan, pengelolaan sumberdaya desa, pemanfaatan potensi masyarakat desa, serta pengelolaan dana desa. Kegiatan aparatur desa akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan pengoptimalan dalam melaksanakan kinerja aparatur desa sebab dengan adanya pengoptimalan aparatur desa akan memudahkan terealisasinya suatu tujuan yang sesuai harapan. Dalam pengoptimalan dana desa yang di lakukan aparatur desa tidak lepas dari upaya pembangunan untuk kemajuan suatu desa untuk mencapai pembangunan yang optimal suatu

³⁶ Agung harliyadi imam dhuhuri, *Edukasi Dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat Menghadapi Covid-19* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2021). 31.

³⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015). 562.

pembangunan sangat membutuhkan peran manajemen, dengan adanya manajemen suatu tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya akan lebih mudah dan efisien dalam proses pencapaian.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten. Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima asing, barat, dan timur yang boleh digunakan oleh masyarakat dan menolak apa yang berbahaya bagi mereka nilai-nilai hidup Islam. Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan adalah pembangunan Islam adalah berlandaskan orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (morak, kebendaan, dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan hidup di dunia dan akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.³⁸

Pembangunan dalam Islam bukanlah berarti membangun negara Islam, melainkan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam setiap tindakan, demi mewujudkan pemberdayaan masyarakat adil dan bersih dalam upaya pengoptimalisasian kinerja aparatur desa. Dimana secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Maksud dari pengertian tersebut yaitu pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai pemberdayaan, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. Empowerment, dalam khasanah Barat lebih bermuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. yang relevan untuk bergerak secara mandiri.³⁹

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa yang ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat memanfaatkan proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.⁴⁰

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentu tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan di maksimalkan atau diminimalkan.

³⁸ Nur sahida mohammad dkk, “Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal”, *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII*, ISSN: 2231 (2013), 362.

³⁹ Ambar Teguh Sulastiani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004). 78.

⁴⁰ Krisna amelia yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung* (Tulungagung, 2017). 17.

b. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga diharapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

c. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Optimalisasi ini sangat diperlukan diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi aparatur desa. Komponen standar pelayanan yang dapat menunjang atau sebagai bentuk pengoptimalisasian yaitu system, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, kompetensi pelaksanaan yang memberikan hasil kepuasan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Jadi dalam hal ini peran optimalisasi sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan aparatur untuk mencapai suatu pembangunan yang bernilai lebih atau maksimal dari sebelumnya. Demi mencapai kepinginan bersama yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakatnya.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat merupakan suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis.⁴¹ Sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dan cara pandang yang luas dan tepat. Agar ketika sewaktu-waktu mengalami masa yang tidak baik akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Sehingga keputusan yang diambil memiliki dampak yang sangat besar sehingga apabila salah sedikit saja berpengaruh pada keseluruhan proses suatu organisasi. Sepertihalnya program pembangunan desa, dalam pembangunan desa bukan saja sekedar memberikan berbentuk fisikis, namun pembangunan yakni meliputi pembangunan taraf kesejahteraan masyarakat, fasilitas masyarakat dan lainnya yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik.

Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti yang di terangkan pada QS. Al maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan*

⁴¹ matthoriq dkk, 'Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir', *Jurnal Administrasi Publik*, 2, No. 3. (2008), 427.

*takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*⁴² (QS. Al maidah ayat 2)

Berdasarkan makna di atas ayat ini menjelaskan tentang pembangunan ini maksudnya mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam islam, karena dengan adanya tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia dalam mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas demi mengelakan kerusakan pada manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada kerugian dunia ahirat yang dialami dalam mencapai suatu kemaslahatan manusia pada lingkungan alam dan sosialnya.

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.⁴³

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam firman Allah QS. al-Anfal ayat 53:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Anfal ayat 53)

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Maka dari itu keterbatasan sumber daya merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi masyarakat. Keterbatasan ini berperan penting sebagai acuan untuk dapat hidup menjadi lebih baik dengan menanamkan asas keyakinan dan upaya maksimal dalam mengelola karunia yang ada demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam memimpin dan mengelola suatu wilayah dengan maksimal. Sebab perubahan terkecil dari sebuah wilayah pemerintahan di mulai dari masyarakatnya yang dicover oleh pemimpinnya

Optimalisasi ini menjadi upaya sangat diperlukan diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi seorang administrasi negara. Komponen standar pelayanan yang dapat menunjang atau sebagai bentuk pengoptimalisasian

⁴² Merdeka, 'Al Qur'an Digital' <<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2#>> [accessed 25 April 2021]. Pukul 23.18

⁴³ Nur sahida mohammad dkk.

diantaranya yaitu dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian.

Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi pengoptimalan tenaga kerja aparatur desa antara lain yakni dengan perluasan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja aparatur desa. Dengan tujuan mengurangi resiko ketertinggalan informasi pembangunan nasional dalam proses pengelolaan dana desa dengan melihat kesesuaian dan keefektifan dalam mengambil kebijakan dalam proses pengelolaan dana desa dalam suatu desa. Tujuan atau manfaat dari adanya suatu pengoptimalan yakni untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem atau keputusan untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam memaksimalkan atau meminimalkan, yang disesuaikan dengan kriteria dan tujuan tertentu.

2. Indikator Optimalisasi

Adapun indikator dari optimalisasi adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas

Menurut Kurniawan efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektifitas merupakan tahap tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁴⁴

Menurut Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas merupakan hubungan antara output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang telah ditentukan.⁴⁵

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha efektivitas adalah sebuah kinerja organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan secara terus menerus hingga mencapai tujuannya secara efektif.⁴⁶ Jadi efektivitas menurut Chaizi Nasucha adalah suatu hasil dari perkumpulan yang saling memenuhi dan melengkapi dalam pencapaian tujuan yang terus menerus berusaha mencapai tujuan yang paling efektif. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah sesuatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang menjadi kehendaknya. Misalkan misalkan ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaki dan telah direncanakan sebelumnya terlaksana.

⁴⁴ Ulum Ihyaul Md, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: Umm Press, 2004). 294.

⁴⁵ Asnawi, 'Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Cornet Wilayah Malang Kota' (Umm, 2003). 6.

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005). 3-4.

b. Efisiensi

Efisiensi sering halnya dikaitkan dengan kinerja sesuatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). The Liang Gie dan Miftah Toha menjelaskan bahwa efisiensi adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan secara efisien yang dapat memberikan output yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas.⁴⁷ Efisiensi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebenar-benarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam waktu yang relative singkat, tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat tenaga dan waktu.⁴⁸ Berdasarkan pengertian diatas, efisiensi merupakan sebuah hasil yang telah dicapai dan diwujudkan melalui beberapa tahapan yang sudah dipersiapkan diantaranya yaitu perencanaan, dan pengelolaan yang optimal dengan mengutamakan alat yang tepat, biaya yang lebih rendah dengan pelaksanaan sesuai rencana atau penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat.

Efisiensi merupakan suatu upaya yang berhubungan dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep pencapaian merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan atau keberhasilan yang diperoleh oleh disatupihak, dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan di pihaklain atau pihak pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pencapaian yang maksimal dan membuat dampak yang besar dalam mengambil suatu kebijakan. Di sisi lain pemerintah menekan dampak seminimal mungkin sehingga konsep efisiensi dapat tercapai. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan biaya, waktu, tenaga, seminimum mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan dengan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimal. Karena efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relative, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

c. Produktivitas

Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan profesional, sehingga dapat berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja.⁴⁹ Produktivitas dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan enterdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif dengan menggunakan sumber-sumber yang efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikut sertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, teknologi, manajemen, informasi, energy dan sumber-sumber yang lainnya yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan standar hidup melalui konsep total ataupun semesta.

Menurut sebagian ahli, produktivitas berarti lebih banyak hasil dengan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan suatu yang benar, bekerja lebih cerdas dan lebih keras, atau pengoprasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas adalah:

⁴⁷ Rini Sri Wulandari, 'Perencanaan Pengukuran Efisiensi Kinerja Program Pendamping Desa Di Kabupaten Sidoarjo Dengan Metode Dea', *Jurnal Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*, V (2017), 1.

⁴⁸ Atika Widady, 'Analisis Efisiensi Dan Produktivitas Program Studi S-1 Fakultas Teknik Universitas Negri Yogyakarta' (Uny, 2017). 9.

⁴⁹ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

1. Efisiensi

Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan efisiensi pemakaian sumberdaya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam perbandingan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang akan dicapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar persentasi target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.

3. Kualitas

Kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas.⁵⁰

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan pencapaian suatu tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Pengelolaan berasal dari kata management yang berarti mengatur, mengelola, menanganinya, serta membuat sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjalankan roda suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini pengertian mengelola menurut para ahli:

Menurut George R. Terry pengelolaan merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata.⁵¹ Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pemerintahan secara keseluruhan. Sebab, tanpa adanya manajemen tidak mungkin tujuan pemerintahan dapat terwujudkan secara optimal. Sedangkan menurut Stoner & freeman berargumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengertian pengelolaan menurut George R. Tarry dan Stoner & Freeman yaitu suatu tahapan dalam proses pencapaian suatu tujuan yang sudah di jadikan tujuan awal dalam pencapaian.

Follet mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu seni yang di setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan orang lain. follet juga menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu menciptakan kekuatan kelompok dari pada mengekspresikan kekuatan pribadi dalam melakukan sebuah kegiatan pengelolaan. Sedangkan menurut Everard menyatakan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai organisasi sasaran organisasi. Jadi berdasarkan pengertian Follet dan Everard et. Al memandang arti dari pengelolaan yaitu memposisikan pengelolaan sebagai tahap yang mengedepankan sebuah kualitas yang terdapat pada sebuah organisasinya dan dalam hal ini tidak mengutamakan kualitas pribadinya namun lebih mengutamakan kualitas bersama.

Dari berbagai pendapat para ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu upaya yang sistematis dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan

⁵⁰ Atika Widady. Op.cit, 11-13.

⁵¹ mariyani Umi chotimah, *Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran PPKN* (Bening Media Publishing, 2021). 129.

efisien dengan menggunakan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan menurut pandangan islam diantaranya di jelaskan di dalam ayat di bawah ini yang menegaskan bahwa dalam melakukan sesuatu pekerjaan, hendaklah mempunyai tanggung jawab dan amanah akan apa yang harus dikerjakan, menjunjung profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti yang telah di tegaskan dalam QS. Al hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al hasyr ayat 18)

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya sekedar melakukan kegiatan, akan tetapi meliputi fungsi fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

George R. Tarry menyatakan, “manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya”. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya. Berbagai sumberdaya pokok dari manajemen itu harus dikaitkan dengan keempat fungsi-fungsi manajemen agar tujuan yang ditentukan dapat terwujud.⁵² Sedangkan Stoner mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usah-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Stoner secara jelas menggunakan kata proses dan bukan hanya sebuah seni, sebagaimana yang diungkapkan oleh follet misalnya yang beralasan titik tekan manajemen sebagai seni dapat mengandung arti bahwa hal itu merupakan kemampuan atau ketrampilan pribadi, sedangkan proses adalah sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua pemimpin tanpa memandang kecakapan atas ketrampilan khusus yang dimiliki secara personal, melainkan diperlukannya melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dan berhubungan secara menyeluruh.⁵³ Jadi manajemen merupakan suatu proses yang memiliki indikator yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari sebuah harapan menjadi hasil yang maksimal. Sebab kinerja maksimal sangat di perlukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan terpenuhinya upaya dalam pencapaian hasil. Sebab hasil akan berbicara saat masyarakat masih berada di taraf minimum akan beranjak kearah maksimum apabila pengelolaan berjalan saling berkesinambungan pemberdayaan masyarakat akan mudah terrealisasikan.

Pemberdayaan dan pemaknaan hidup tersebut diidenifikasikan oleh Allah SWT sebagai *‘imraul ard’* (pemakmuran dunia) sebagai tugas manusia dimuka bumi dalam dimensinya yang amat luas meliputi pembangunan masyarakat manusia yang kuat dan sehat

⁵² Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Grasindo). Hal. 3.

⁵³ Zaidan, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 12.

secara fisik dan rohani. Tugas mulia ini ditegaskan oleh Allah SWT didalam Al-Quran, surah Huud ayat 61:

وَالِىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepadanya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat sekali (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).⁵⁴ (Q.S Huud ayat 61)

Dalam pendekatan manajemen diterangkan bahwa salah satu aspek terpenting dari sebuah manajemen adalah adanya pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan yang baik dan etika dalam berorganisasi. Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik, mulai dari strukturnya, sumber daya manusianya, maupun aspek yang lainnya. Organisasi pemerintahan akan dapat berhasil dan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditopang dengan adanya organisasi yang kokoh dan baik. Namun sebaliknya, apabila organisasinya lemah dan keropos, maka pemerintahan akan berjalan ibarat pepatah hidup segan matipun tak mau. Sehingga dapat dikatakan pengorganisasian juga merupakan awal mula kesuksesan suatu lembaga atau instansi pemerintahan.

Maka dari itu, diperlukan pengorganisasian yang secara teori serta etikanya diambil dari al-Qur'an dan hadits. Ali bin Abi Thalib r.a. bersabda:

الْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

Artinya :Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik.

Pada intinya Ali bin Abi Thalib ingin mendorong kaum muslim agar jika melakukan sesuatu yang hak, hendaknya ditata dan disusun dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan yang disusun secara rapi. Dominasi kemungkaran sering terjadi, bukan karena kuatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena tidak rapihnya kekuatan (yang hak/ yang baik). Pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan pada suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, perusahaan, serikat pekerjaan dan organisasi lainnya. Dengan adanya pengelolaan yang baik akan mengindikasikan bahwa suatu organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki peringkat minimal untuk menjamin kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, memnciptakan keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggotanya, yang terutama melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota dalam meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangun. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga dampak negative terhadap reputasi mereka yang di wakiliannya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen yang penting untuk memastikan suatu organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Berdasarkan pengertian di atas jika disederhanakan maka manajemen merupakan suatu proses yang memandang bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. sebab manajemen itu merupakan suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi yang dimana proses tersebut terdiri dari kegiatan-

⁵⁴ 'QS. Hud Ayat 61', Sumber: Kemenag.Go.Id <<https://kalam.sindonews.com/ayat/61/11/hud-ayat-61>>. Di akses pada 23/04/2021 pukul 21.48

kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

2. Indikator pengelolaan

George R. Tarry mengemukakan makna pengelolaan terdiri dari tindakan-tindakan seperti yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan/ penggerakan), *Controlling* (pengawasan). Masing masing akan diuraikan sebagai berikut :⁵⁵

a. Perencanaan (*planning*)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu :

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result”. Yang artinya “Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.⁵⁶ Jadi perencanaan menurut George R. Tarry yaitu penentuan tujuan yang di pertimbangkan dengan logika yang dituangkan melalui perumusan agenda yang akan dikerjakan.

Berikut pengertian perencanaan (*planning*) menurut para ahli, yaitu :

Ivancevice dan Matesson menjelaskan bahwa perencanaan (*planning*) jika digunakan dengan baik lebih baik tentu saja membantu manajemen dalam mengadaptasi suatu perubahan, kedudukannya semakin sangat penting pada masa depan untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang diharapkan. Sedangkan menurut Siagian mengatakan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang, segala sesuatu yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Suandy mengatakan perencanaan adalah sesuatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Sedangkan menurut Daft mengatakan perencanaan adalah proses mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi dan sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan dikatakan sistematis karena perencanaan itu telah ditetapkan tujuan, strategi, metode, anggaran dan standar dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu, proses dalam pengambilan keputusan, pengetahuan dan tehnik secara ilmiah, secara rasional, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan merupakan hasil proses berfikir yang mendalam dari berbagai alternatif, serta menggunakan data yang akurat sehingga dianggap lebih memiliki efektivitas dan efisiensi.⁵⁷ Perencanaan dapat diidentifikasi sebagai penentu terlebih dahulu terhadap apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Dalam perencanaan terlibat unsur penentu yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan.

⁵⁵ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011). 3.

⁵⁶ Sukarna. *Ibid.* 10.

⁵⁷ dkk Marto Silalahi, *Dasar-Dasar Manajemen & Bisnis*, ed. by Abdul Karim & Bonaraja Purba (Yayasan Kita Menulis, 2020).42-43.

Karena itu perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya dimasa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin di capai.

Jadi dapat di simpulkan bahwa pentingnya perencanaan merupakan tahap awal dalam menjalankan fungsi manajemen, serta di butuhnya mental untuk memilih sasaran, kebijakan prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perencanaan merupakan suatu hal yang paling utama didahulukan sebelum mengambil sebuah keputusan, karena perencanaan yang baik akan mempermudah tercapainya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan tujuan harus didasarkan atas kenyataan objektif dan rasional, sebab hasil perencanaan akan bisa dilihat dimasa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala tindakan diperlukannya sebuah perencanaan yang baik terlebih dahulu untuk meminimalisir sebuah resiko.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing atau pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pengorganisasian diharapkan segala bentuk tujuan yang sudah di rencanakan di tahap sebelumnya dapat terealisasi dengan sesuai harapan. Tujuan dari pengorganissian sendiri adalah untuk mengelompokan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, teknologi dan tugas organisasi. Sehingga organisasi dapat diartikan dengan mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.⁵⁸ Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis. Terencana, terorganisasi, terpemimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode dan lingkungan), sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien, efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Orang-orang yang ada didalam sebuah organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relative teratur. Di dalam berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif setiap individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan.⁵⁹ Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Dengan demikian *organizing* merupakan upaya mengalokasikan semua pekerjaan kepada setiap orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi dengan cara membentuk struktur atau

⁵⁸ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992). 9.

⁵⁹ Reza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 15-18.

bagan organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tugas, sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih pekerjaan agar tujuan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya. Karena memberikan kontribusi seperti : pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

c. Pelaksanaan / Penggerakan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*”. Yang berarti “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.⁶⁰ Jadi penggerakan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan sebuah kegiatan yang sudah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar sebuah tujuan dapat tercapai sesuai keinginan. Kegiatan-kegiatan penggerakan (*Actuating*) meliputi:

- a. Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
- b. Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
- c. Memotivasi anggota.
- d. Berkomunikasi secara efektif.
- e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
- f. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- g. Berusaha memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penggerakan itu sangat diperlukan untuk menggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar dapat mencapai tujuan organisasi. Fungsi penggerakan ini adalah ibarat kunci stater mobil, artinya mobil dapat berjalan jika kunci stater telah menjalankan fungsinya. Demikian juga proses manajemen baru terlaksana setelah fungsi penggerakan ditetapkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa *controlling*, yaitu: “*Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard*”. Yang berarti “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”. Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian *controlling* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat

⁶⁰ Sukarna. Op.Cit. 82.

tercapai.⁶¹ Jadi pengawasan adalah sebagai proses penentuan suatu tujuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi :

- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- d. Membuat saran dan tindakan perbaikan.
- e. Memberitahukan anggota yang bertanggungjawab terhadap pemberian penjelasan.
- f. Melakukan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

3. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Muhammad Arif mengatakan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan pengertian pengelolaan menurut beberapa pakar dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah upaya penentuan strategi dalam pencapaian suatu tujuan yang di sudah di targetkan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk pengalokasian Dana Desa (DD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa (DD). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelolaan yang dikelola secara terbuka, dan akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, sedangkan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai wewenang berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
3. Menetapkan bendahara desa.
4. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

⁶¹ Sukarna.Ibid. 110,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban. Seorang kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁶² Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip dasar dan menjadi cerminan dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Sesuai pemendagri nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut ini:

a. Transparansi

Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa serta dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna untuk memenuhi hak masyarakat serta untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi, berarti pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapa pun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

b. Akuntabel

Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara

⁶² Dkk Rendy Adiwailaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).195-197

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Serta mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶³

C. Mentalitas pembangunan

Suatu nilai-budaya yang perlu dimiliki oleh lebih banyak manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah nilai-nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Suatu nilai-budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa dengan lebih saksama dan teliti, dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk berhemat. Kita semua tahu bahwa sifat hemat yang meluas itu sangat perlu untuk mendukung suatu bangsa sebagian dari pendapatannya untuk mengakumulasi modal. Suatu nilai-budaya lain yang juga perlu adalah nilai-budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam. Suatu nilai semacam itu akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi. Pembangunan yang memerlukan usaha mengintensifkan produksi tentu tidak bisa harus memanfaatkan teknologi yang semakin lama semakin disempurnakan.

Menurut pendapat saya masih ada satu nilai budaya lagi yang perlu dikembangkan oleh setiap bangsa yang ingin memperbesar tekanan intensitas usahanya untuk mempertinggi produksinya dan menjadi sedikit lebih makmur. Hal itu adalah terutama nilai-budaya yang menilai tinggi usaha orang yang dapat mencapai hasil, sedapat mungkin atas usahanya sendiri. Suatu nilai itu tentu saja jika diekstremkan akan ada bahayanya menuju ke arah individualisme, dan jika berkembang ke arah yang lebih ekstrem lagi, akan menjadi isolisme. Namun kalau kita ingat bahwa nilai-budaya kita menunjukkan kontras yang amat besar dengan individualisme, yaitu nilai yang berhubungan dengan vertikal ke arah atasan, ke arah orang yang senior, ke arah orang yang berpangkat tinggi, yang selalu harus dimintai restu dulu, maka kita mengerti bahwa kita harus sedikit. Nilai yang mengutamakan vertikal ke arah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri, dan akan menyebabkan timbulnya sikap tak percaya kepada diri sendiri. Nilai seperti itu juga akan menghambat tumbuhnya rasa yang murni, orang hanya akan mematuhi jika ada pengawasan dari atas, tetapi akan merasa tidak diperhatikan lagi jika pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi. Akhirnya nilai yang diberikan kepada arah bawahan akan mematikan rasa tanggung jawab sendiri, tetapi akan membuat rasa yang condong untuk selalu melemparkan tanggung jawab ke atas, atau kalau tidak bisa, untuk selalu membagi tanggung jawab itu dengan orang lain. itu menjadi seminimal mungkin.⁶⁴

Akhir-akhir ini sering terdengar seperti anjuran dari pihak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar partisipasi rakyat berpartisipasi dalam pembangunan. Namun di berbagai provinsi (tidak semuanya) dan terutama mengenai daerah administratif di bawah provinsi, sering masih belum ada pengertian yang jelas konsep "partisipasi rakyat dalam pembangunan" itu. Kadang-kadang "partisipasi rakyat yang intensif" disamakan dengan frekuensi tinggi sertanya rakyat pedesaan dalam

⁶³ Bawono, Icuk Ranga. Op.cit. 104-106.

⁶⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia, 1995). 34-36.

aktivitas-aktivitas bersama. Dalam hal itu maka fokus diletakkan pada frekuensi mengadakan pengarahan aktivitas bersama, dengan kurang menilai mutu kerja serta relevansinya dalam rangka pendapaian kebijaksanaan yang menjadi pedoman pembangunan. Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang padanya berbeda, yaitu tipe partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus dan tipe Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Dalam tipe partisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, dipersuasi, diperintahkan oleh wakil wakil dari berbagai warna Departemen atau oleh Pamong Desa, untuk berpartisipasi dan memanfaatkan tenaga atau hartanya proyek-proyek pembangunan khusus, yang biasanya bersifat fisik. kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyeknya itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan upah tinggi. Sebaliknya, jika mereka diperintah dan dipaksa oleh atasan mereka untuk ikut sertakan tenaga atau harta yang mereka punya untuk proyek tadi, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat kerja rodi. Contoh-contoh dari tipe Partisipasi seperti terurai di atas adalah misalnya: partisipasi orang desa dalam proyek mengeraskan atau memperluas jalan desa, dalam membuat saluran irigasi, dalam membuat jembatan desa, dalam proyek penghijauan, dalam kursus buta huruf, dan sebagainya. Dalam partisipasi tipe kedua tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada proyek-proyek pembangunan, biasanya tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan partisipasi rakyat atas perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi selalu atas kemauan mereka sendiri. Contoh dari tipe partisipasi keluarga seperti terurai dalam alinea ini adalah misalnya: partisipasi dalam Bimas, menjadi akseptor berencana, menabung di Tabanas dan sebagainya.

Karyawan dan petugas yang harus menginstruksi rakyat di pedesaan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek aktivitas bersama (partisipasi tipe pertama) biasanya tidak dapat melampaui pamong desa dan pimpinan desa yang resmi. Dalam zaman kolonial dulu struktur pemerintahan adalah sedemikian rupa, sehingga segala instruksi dari atas itu harus disalurkan melalui garis hierarki pamongpraja (dulu namanya pangreh praja). Memang dalam zaman kolonial belum banyak jawatan yang turun ke bawah sampai ke desa, sehingga koordinasi dari instruksi-instruksi kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah masih bisa dikuasai oleh pamong praja. Sekarang jumlah departemen-departemen, direktorat-direktorat jenderal, direktorat-direktorat, dinas-dinas ABRI, bahkan kadang-kadang biro-biro yang memiliki ujung jarinya di masyarakat pedesaan dan ingin ikut serta menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sudah banyak hal. usaha koordinasi dari semua instruksi dari atas itu menjadi amat sulit untuk dikuasai oleh pamong praja. Meskipun demikian, sampai sekarang jalan yang terbaik untuk menginstruksikan rakyat pedesaan untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek yang bersifat aktivitas-aktivitas bersama, masih tetap melalui saluran pamong praja.

Karyawan dan petugas yang harus mengajak, mempersuasi, dan menginstruksikan rakyat pedesaan itu untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan sebagai individu (partisipasi tipe kedua), menghadapi masalah yang jauh lebih rumit. Karena partisipasi rakyat itu berdasarkan suatu keputusan mereka sendiri sebagai individu, maka hanya perintah dari lurah atau camat saja tidak cukup. Keputusan seorang warga desa untuk menjadi akseptor dalam keluarga berencana misalnya, tidak bisa hanya berdasarkan atas perintah lurah atau camat, melainkan suatu keyakinan yang mendalam bahwa partisipasinya sungguh bermanfaat, pertama untuk dirinya sendiri dan keluarganya. dan kemudian untuk masyarakat dan negara. Hal itu hanya bisa dicapai dengan suatu proses persuasi dan penerangan yang intensif dan lama.

Ada beberapa ahli ilmu sosial yang berpendirian bahwa berhasilnya persuasi dan penerangan kepada rakyat pedesaan itu belum tentu menjamin bahwa rakyat pedesaan akan ikut serta berpartisipasi (tipe kedua), tanpa adanya restu dari lurah atau pihak atasan. Sekali lagi di sini muncul nilai-nilai budaya yang terlampaui berorientasi vertikal ke arah atasan, yang telah berapa kali di sebut

dalam karangan-karangan terdahulu dalam seri ini, dan yang akan menghambat suatu keputusan progresif dari rakyat pedesaan.⁶⁵

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa melakukan aksi kolektif sebagai satu kesatuan tata Kelola pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat, serta kesatuan ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan mulai dari pusat hingga kecamatan, serta Lembaga-Lembaga formal dan informal desa, seperti BPD, forum musyawarah desa, Lembaga adat desa, BUM Desa, dan kelompok masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu, peran dari dunia usaha dan media massa juga diperlukan agar pemberdayaan bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel.⁶⁶

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk pemihakan, penyiapan, dan perlindungan bagi rakyat dalam rangka pemmbangunan kualitas hidup yang lebih baik sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu menghasilkan produk dan mendapatkan manfaat dari produk yang mereka hasilkan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, agen pemberdayaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Berikut ini prinsip-prinsip pemberdayaan:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, bakat, masalah, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang bersifat pemaksaan harus dihindari karena pemaksaan bukan ciri dari pemberdayaan.
2. Kegiatan pemberdayaan dilandaskan pada kebutuhan, masalah dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertinggal dan belum terbuka pada perubahan, aspek, kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak dipermukaan. Agar pemberdayaan perlu melakukan observsi secara tepat dan akurat. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klie/sasaran.
3. Pemberdayaan berarti menumbuhkan Kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerja sama, musyawara mufakat, dan kearifan lokal yang merupakan bagian dari jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.⁶⁷

⁶⁵ Koentjaraningrat. 79-82.

⁶⁶ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV. Utama, 2005). 114-115.

⁶⁷ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).36-37.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Abdul rahman ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Amelia Krisna yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung* (Tulungagung, 2017).
- Asnawi, 'Efektifitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Cornet Wilayah Malang Kota' (Umm, 2003).
- Bawono, Ick Rangga, erwin setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, ed. by junaidi (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).
- Dini Ajeng Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, dkk Marto Silalahi, *Dasar-Dasar Manajemen & Bisnis*, ed. by abdul karim & bonaraja purba (Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Dkk Rendy Adiwailaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).
- dkk Mustofa Abi Hamid, *Pengelolaan Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021).
- dkk Nur sahida mohammad, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal", *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII*, ISSN: 2231 (2013).
- Fahmi Irham, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Hasan , M. iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Hotniar Siringoringgo, *Pemograman Linier : Seri Teknik Oprasi* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005).
- Ihyaul Ulum Md, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: Umm Press, 2004).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia, 1995).
- Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Grasindo).
- M. Oos Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: ALFABETA, 2014).
- Mariyani Umi chotimah, *Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran PPKN* (Bening Media Publishing, 2021).
- Moleong , Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006).
- Muh. Fitrah, Lutfiyah &, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (CV. Jejak (jejak publisher), 2018).
- matthoriq dkk, 'Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir', *Jurnal Administrasi Publik*, 2, No. 3. (2008) .
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1992).
- Mochammad Zaini, Mustakim, *KEPEMIMPINAN DESA, Kementriaan Desa, Pembangunan Daerah*

- Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia* (Indonesia, 2015).
- Maryana, Rita, Rachmawati, Yeni, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Prenada Media, 2013).
- M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradikma, 2005).
- Musliadi, *UNDANG UNDANG DESA & PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA* (Permata Press).
- Nawaw, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gama Press, 1987).
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Pratama Reza, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Rahmasari, Anggraeni, Nakok Aruan, Slamet Hari Susanto, "Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019" *PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI* (Badan Peneliti dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019).
- Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi: Konsepsi Dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- R. Terry George, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).
- Sahida Nur Mohammad dkk, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal", *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII*, ISSN: 2231 (2013).
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi 2* (Jakarta: PT. Indeks, 2003).
- Setyad Irwin Bawono, Icu Rangga, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, ed. by Junaidi (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).
- Siringoringo, Hotniar, *Pemrograman Linier : Seri Teknik Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv, 2017).
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: YP Fk. Psikologi UGM, 1985).
- S Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011).
- Teguh Ambar Sulastiani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).
- Torang Syamsir, *Organisasi Dan Manajemen* (Bandung: ALFABETA, 2014).
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015).

Wardiyanto, Bintoro, Siti aminah, Ucu martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa* (surabaya: Airlangga University Press, 2016).

Widjaja, *OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

Zaidan, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sumber jurnal

Dkk, Revaldo W.sindakh, 'Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendaptan Asli Daerah Kota Bitung', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 No.2337–5736 (2019).

Ekasari, Ratna, 'Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi', EA Publishing, 2020.

Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Sosial Ilmu Administrasi Dan Manajement* (Jakarta: HajiMasagung, 1997).

Indrawati Weni, 'Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin', *Jurnal Skripsi*, 20017.

Lamangida, Trisusanti, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyouto', *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6, (2017),

P.A, Antono Herry, 'Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V, 739.

Qohar, Abdul, 'Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern', *Jurnal TAPIS Vol.8*, 2012, 140.

Somad Rismi dan donni juni Priansa, *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sumiati & aris tri haryanto, 'Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Ngawi', *Ji@p*, Vol.4.

Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV. Utama, 2005).

Setya Pintona Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negri Malang, 2020).

Sri Rini Wulandari, 'Perencanaan Pengukuran Efisiensi Kinerja Program Pendamping Desa Di Kabupaten Sidoarjo Dengan Metode Dea', *Jurnal Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*, V (2017).

Wakhid, Ali Abdul, 'Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia', *Jurnal TAPIS*, 01 (2017),

Sumber Wawancara

Subandi, wawancara dengan kepala Desa Mujirahayu, wawancara tatap muka, 18 juni 2021.

Andriansyah, wawancara dengan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa , wawancara tatap muka, 18 juni 2021.

Toni Anwar, wawancara dengan masyarakat Desa Mujirahayu, wawancara tatap muka, 18 juni 2021..

Karjono . wawancara dengan ketua kelompok pengembangan peternak desa Mujirahayu , wawancara tatap muka, 20 juni 2021.

Cecep, wawancara dengan anggota kelompok peternak, wawancara tatap muka, 18 juni 2021.

Eko Saripudin, wawancara dengan kaur keuangan desa , wawancara tatap muka, 20 juni 2021.

eko budi aris santoso skretaris, wawancara dengan skretaris desa Mujirahayu, wawancara tatap muka, 18 juni 2021.

Tombol, wawancara dengan anggota kelompok pengembangan peternak desa Mujirahayu , wawancara tatap muka, 20 juni 2021.

Karjono . wawancara dengan ketua kelompok pengembangan peternak desa Mujirahayu, wawancara tatap muka, 20 juni 2021.

Sukanto, wawancara dengan skretaris kelompok pengembangan peternak desa mujirahayu, wawancara tatap muka, 21 juni 2021.

Susanto, wawancara dengan masyarakat desa Mujirahayu, wawancara tatap muka, 21 juni 2021.

Sumber website

Lektur, id, '4 Arti Kata Mengelola Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://lektur.id/arti-mengelola/>> [accessed 5 February 2021].

Mada, universitas Gajah, 'Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945', *Universitas Gajah Mada*, 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<http://kbbi.web.id/optimalisasi.html>> [accessed 10 April 2021].

Merdeka, 'Al Qur'an Digital' <<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2#>> [accessed 25 April 2021]. Pukul 23.18.

'QS. Hud Ayat 61', *Sumber: Kemenag.Go.Id* <<https://kalam.sindonews.com/ayat/61/11/hud-ayat-61>>. Di akses pada 23/04/2021 pukul 21.48.

Sumber dokumentasi

harliyad Agungi imam dhuhuri, *Edukasi Dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat Menghadapi Covid-19* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2021).

Makalang Juainita Astri dkk, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Manado', 2015.

Widadty Atika, 'Analisis Ifisiensi Dan Produktivitas Program Studi S-1 Fakultas Teknik Universitas Negri Yogyakarta' (Uny, 2017).